

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Republik Rakyat Tiongkok (RRT) merupakan salah satu kekuatan besar dunia dengan perekonomian raksasa. Berdasarkan laporan *International Monetary Fund* (IMF) tahun 2022, Tiongkok memiliki Pendapatan Domestik Bruto (PDB) sebesar US\$18,32 triliun dan menjadikannya negara dengan PDB terbesar kedua dunia.¹ Perekonomian Tiongkok didukung oleh pelaksanaan inisiatif prestisius di berbagai kawasan. Di antaranya adalah *Belt and Road Initiatives* (BRI) yang bertujuan menjaga tingkat pertumbuhan ekonomi Tiongkok lebih unggul dari pertumbuhan ekonomi internasional melalui investasi infrastruktur.² Selanjutnya, terdapat inisiatif *Made in China 2025* yang bertujuan menjadikan Tiongkok mendominasi manufaktur teknologi tinggi global.³ Inisiatif-inisiatif tersebut telah menggambarkan kebijakan luar negeri yang dijalankan pemerintah Tiongkok.

Pada beberapa dekade terakhir, Tiongkok berusaha meningkatkan konektivitas dan penguatan ekonominya di kawasan Eropa. Pada tahun 2003, Tiongkok dan Uni Eropa (UE) menandatangani “Kemitraan Strategis Komprehensif” yang dimaksudkan untuk meningkatkan hubungan kedua pihak dari bidang ekonomi ke politik dan bahkan keamanan.⁴ Tiongkok juga mendekati kawasan ini

¹ “GDP, current prices, “ International Monetary Fund (IMF), diakses 14 November 2022, <https://www.imf.org/en/Countries/CHN#data>.

² Gerard Roland, “China’s Rise and Its Implications for International Relations and Northeast Asia,” *Asia and the Global Economy* 1, no. 2 (2021): 2, <https://doi.org/10.1016/j.aglobe.2021.100016>.

³ “Is ‘Made in China 2025’ a Threat to Global Trade?,” The Council on Foreign Relations (CFR), diakses 28 September 2022, <https://www.cfr.org/background/made-china-2025-threat-global-trade>.

⁴ Thomas Christiansen dan Richard Maher, “The Rise of China—Challenges and Opportunities for the European Union,” *Asia Europe Journal* 15, no. 2 (June 1, 2017): 122.

melalui perdagangan subregional terutama dengan kawasan Nordik. Semenjak menjadi bagian dari *World Trade Organization* (WTO) pada tahun 2001, Tiongkok telah menjadi destinasi ekspor utama bagi perekonomian negara-negara Nordik.⁵ Selain melakukan perdagangan di kawasan tersebut, Tiongkok juga terlihat memiliki hubungan dekat dengan salah satu negara Nordik, yaitu Denmark.

Hubungan antara Tiongkok dan Denmark sejatinya sudah berlangsung sejak abad ketujuh belas. Pada tahun 1674, kapal dagang Denmark “Fortuna”, berangkat dengan membawa surat pribadi dari Christian V, Raja Denmark, untuk Kaisar Tiongkok, Kangxi, dan menandakan awal persahabatan dari kedua negara.⁶ Pada tahun 1732, Denmark mendirikan Perusahaan Asiatik yang membantu perdagangan kedua negara menjadi lebih teratur. Sejak berdirinya perusahaan tersebut, Denmark telah mengirimkan 124 kapal dagangnya ke Tiongkok.⁷ Pada tahun 1869, giliran Tiongkok yang melakukan misi diplomatik pertamanya ke Denmark.⁸ Selanjutnya Tiongkok dan Denmark secara resmi menjalin hubungan diplomatik pada tanggal 11 Mei 1950 dan menjadikan Denmark sebagai negara barat kedua setelah Swedia yang menjalin hubungan diplomatik dengan Beijing.⁹

Tiongkok terus mengembangkan hubungan bilateral bersama Denmark di berbagai bidang. Denmark sendiri memiliki beberapa kelebihan yang membuat

⁵ Julian Tucker and Johannes Nordin, *China and the Nordics: Tracing Trends in Relations* (Stockholm: Institute for Security and Development Policy, 2021), 27-28.

⁶ “New Voyage of the Friendship between China and Denmark by Ambassador Liu Biwei,” *Embassy of The People’s Republic of China in The Kingdom of Denmark*, diakses 25 September 2022, http://dk.china-embassy.gov.cn/eng/zdgx/pe/201705/t20170502_3157492.htm.

⁷ Ole Lange, “Denmark in China 1839-65: A Pawn in a British Game: An Interim Account of Danish Economic and Diplomatic Activity,” *Scandinavian Economic History Review* 19, no. 2 (1971): 71.

⁸ Mads Kirkebæk, “The Establishment of a Danish Legation in China 1912,” dalam *China and Denmark: Relations Since 1674*, ed. Kjeld Erik Brødsgaard Mads Kirkebæk, (Nordic Institute of Asian Studies, 2000), 73.

⁹ “China and Denmark,” Embassy of The People’s Republic of China in The Kingdom of Denmark, diakses pada 7 Januari 2023, http://dk.china-embassy.gov.cn/eng/zdgx/pe/200405/t20040514_3157374.htm#:~:text=China and Denmark&text=The Kingdom of Denmark recognized,11 in the same year.

Tiongkok tertarik untuk menjalin kerja sama. Denmark merupakan negara yang paling menarik untuk berinvestasi di sektor energi berkelanjutan.¹⁰ Selain itu, Denmark merupakan negara sejahtera yang memiliki fasilitas sosial mumpuni dan pendidikan gratis.¹¹ Pada tahun 2008, kedua negara terlihat menyepakati Kemitraan Strategis Komprehensif yang berfokus kepada kegiatan penelitian, inovasi, dan pendidikan.¹² Pada Februari 2017, kedua negara juga menjalankan program 2017 *China-Denmark Tourism Year* yang bertujuan meningkatkan pariwisata kedua negara dan merupakan yang pertama kalinya di Eropa.¹³ Dengan hubungan politik yang terus meningkat, kedua negara kemudian menyepakati kerja sama *China-Denmark Joint Work Programme* (2017-2020) pada tanggal 13 Mei 2017.

China-Denmark Joint Work Programme (2017-2020) bertujuan untuk memperkaya dan meningkatkan kerja sama yang menguntungkan menjadi lebih baik.¹⁴ Berdasarkan laporan resmi pemerintah Tiongkok, kerja sama ini terdiri dari enam fokus pembangunan, yaitu Pertama, meningkatkan kerja sama di bidang politik, peradilan, dan internasional. Kedua, memperoleh manfaat hubungan ekonomi, transportasi, dan infrastruktur. Ketiga, meningkatkan kerja sama di bidang ilmu pengetahuan, pendidikan, kebudayaan, pariwisata, dan akademi. Keempat, memajukan kerja sama pangan dan pertanian. Kelima, meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Keenam, membangun peradaban hijau

¹⁰ "Denmark," *EU-China Business Association*, <http://www.eucba.org/en/members/denmark>. EU-China Business Association

¹¹ Stefan B. Andrade and Jens Peter Thomsen, "Intergenerational Educational Mobility in Denmark and the United States," *Sociological Science* 5, no. 2009 (2018): 94.

¹² Joakim Persson, "Crown Prince of Denmark Visiting China," *Scandasia*, 2017, <https://scandasia.com/crown-prince-of-denmark-visiting-china/>

¹³ Nadja Dam Jensen, "China Denmark Tourism Year Opens in Beijing," *ScandAsia*, 2017, <https://scandasia.com/china-denmark-tourism-year-opens-in-beijing/>.

¹⁴ *China-Denmark Joint Work Programme* (2017 – 2020), Ministry of Foreign Affairs of People's Republic of China

dan berkelanjutan.¹⁵ Semua tujuan tersebut diturunkan ke dalam 58 sektor kerja sama yang melibatkan 80 institusi asal Tiongkok dan Denmark.¹⁶

China-Denmark Joint Work Programme (2017-2020) merupakan pencapaian yang luar biasa mengingat perbedaan kedua negara. Tiongkok dan Denmark memiliki perbedaan seperti dari jarak kedua negara, kondisi geografis, jumlah penduduk, kebudayaan, sumber daya alam, dan perekonomian. Tiongkok juga menerapkan ideologi komunisme dan menjalankan sistem negara-partai.¹⁷ Sedangkan Denmark merupakan negara monarki konstitusional yang terdiri dari berbagai partai.¹⁸ Jika ingin memperoleh keuntungan yang lebih besar, akan lebih menguntungkan menjalin kerja sama ini dengan negara-negara besar Eropa seperti Inggris, Jerman, dan Perancis. Meskipun demikian, Denmark merupakan satu-satunya negara Eropa yang menjalankan kerja sama dengan mekanisme *joint work programme* (program kerja bersama) bersama Tiongkok. Sehingga penting untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong Tiongkok untuk menjalankan kerja sama *China-Denmark Joint Work Programme* (2017-2020) ini.

Kebangkitan ekonomi Tiongkok telah menjadikan negaranya terintegrasi dalam kerja sama di berbagai kawasan. Dalam beberapa dekade terakhir, Tiongkok berusaha untuk meningkatkan konektivitas dan penguatan ekonomi di Eropa terutama di Kawasan Nordik. Salah satu kerja sama yang dijalankan di kawasan tersebut adalah *China-Denmark Joint Work Programme* (2017-2020) bersama

¹⁵ China-Denmark Joint Work Programme (2017 – 2020).

¹⁶ Joakim Persson, "Denmark's Foreign Minister Visited China," *ScandAsia*, 9 Juli 2018, <https://scandasia.com/denmarks-foreign-minister-visited-china/>.

¹⁷ Zhili Bai and Juan Liu, "China's Governance Model and System in Transition," *Journal of Contemporary East Asia Studies* 9, no. 1 (January 2, 2020): 70.

¹⁸ Daniel Skidmore-Hess, "The Danish Party System and The Rise of The Right in The 2001 Parliamentary Election," *International Social Science Review* 78, No. 3/4 (2003): 90-91.

Denmark. Kerja sama ini telah mempengaruhi hubungan Tiongkok dan Denmark. Meskipun memiliki banyak perbedaan seperti dari kondisi geografis, ideologi, dan sistem pemerintahan, Tiongkok tetap memilih dan menjalin kerja sama dengan mekanisme *joint work programme* bersama Denmark. Sehingga penting untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong Tiongkok menjalin kerja sama dengan Denmark melalui *China-Denmark Joint Work Programme* (2017-2020).

1.2 Rumusan Masalah

Tiongkok telah menjadi kekuatan besar dunia dengan perekonomian raksasa. Pada beberapa dekade terakhir, Tiongkok berusaha untuk meningkatkan konektivitas dan penguatan ekonominya di Eropa terutama di Kawasan Nordik. Selain melakukan perdagangan di Kawasan Nordik, Tiongkok terlihat memiliki hubungan dekat dengan salah satu negara di kawasan tersebut, yaitu Denmark. Hubungan Tiongkok dan Denmark terus meningkat terutama sejak menjalin kerja sama *China-Denmark Joint Work Programme* (2017-2020) yang memprioritaskan kepada enam fokus pembangunan. Kerja sama ini perlu dipertanyakan mengingat kedua negara memiliki banyak perbedaan di berbagai aspek termasuk menerapkan ideologi dan sistem pemerintahan yang berbeda. Jika ingin memperoleh keuntungan yang lebih besar, akan lebih baik bagi Beijing untuk menjalin kerja sama ini bersama negara-negara besar Eropa lainnya. Denmark merupakan satu-satunya negara Eropa yang menjalankan kerja sama dengan mekanisme *joint work programme* (program kerja bersama) bersama Tiongkok. Sehingga, penting untuk menganalisis faktor-faktor yang mendorong Tiongkok menjalin kerja sama dengan Denmark melalui *China-Denmark Joint Work Programme* (2017-2020).

1.3 Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan dari penelitian ini adalah “Apa faktor-faktor yang mendorong Tiongkok menjalin kerja sama dengan Denmark melalui *China-Denmark Joint Work Programme* (2017-2020)?”.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang mendorong Tiongkok menjalin kerja sama dengan Denmark melalui *China-Denmark Joint Work Programme* (2017-2020).

1.5 Manfaat Penelitian

1. Secara akademis

Penelitian ini membantu para akademisi, mahasiswa, dan masyarakat umum untuk memahami strategi dan kebijakan luar negeri yang diterapkan oleh Tiongkok dalam memperluas pengaruhnya di Eropa terutama di kawasan Nordik. Selain itu, penelitian ini juga menambah pemahaman dan wawasan terkait faktor-faktor yang mendorong Tiongkok bekerja sama dengan Denmark melalui *China-Denmark Joint Work Programme* (2017-2020).

2. Secara praktis

Penelitian ini membantu membantu lembaga yang mengurus pelayanan urusan luar negeri Indonesia seperti Konsulat Jenderal Republik Indonesia dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tiongkok untuk mengetahui kebijakan luar negeri pemerintah Tiongkok di kawasan Nordik khususnya dalam kerja sama *China-Denmark Joint Work Programme* (2017-2020) bersama Denmark.

1.6 Tinjauan Pustaka

Dalam mengungkap dan menganalisis penelitian ini, peneliti menggunakan literatur bacaan dan penelitian yang dinilai relevan dan layak untuk dijadikan sebagai bahan studi kepustakaan. Terdapat lima karya tulis yang peneliti jadikan sebagai tinjauan pustaka dalam penelitian, yaitu sebagai berikut:

Pertama, literatur bacaan yang berjudul *China's Political Priorities in the Nordic Countries: from technology to core interest* oleh Jerker Hellström. Tulisan ini menjelaskan prioritas kebijakan politik yang diambil oleh Tiongkok pada dinamika kawasan Nordik. Kepentingan Tiongkok merupakan serangkaian kepentingan yang tidak dapat dinegoisasikan yang meningkat menjadi bagian retorika Tiongkok dalam hubungan bilateral dan forum internasional. Prioritas penting Tiongkok di kawasan ini adalah menyerap kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan kapabilitas mereka dalam berinovasi. Lebih lanjut kepentingan ini dibagi menjadi tiga area: 1) stabilitas politik domestik, mengamankan sistem politik dan melanjutkan monopoli kekuasaan Partai Komunis Tiongkok; 2) integritas teritorial dan kedaulatan nasional termasuk reunifikasi nasional dengan Taiwan dan isu yang berkaitan dengan kedaulatan Tiongkok atas Tibet dan Xinjiang; 3) ekonomi berkelanjutan dan pembangunan sosial.¹⁹

Literatur bacaan digunakan untuk mengetahui kebijakan luar negeri yang diambil oleh Tiongkok di kawasan Nordik. Kemampuan mengembangkan teknologi inovatif oleh negara-negara Nordik mendorong perusahaan-perusahaan Tiongkok untuk berinvestasi dan berdagang di kawasan ini. Kondisi ini kemudian menjelaskan prioritas kebijakan politik Beijing di kawasan ini. Peneliti menjadi

¹⁹ Jerker Hellström, *China's Political Priorities in the Nordic Countries: From Technology to Core Interests*, Norwegian Institute of International Affairs, Desember 2016.

lebih paham alasan Beijing melakukan pendekatan terhadap kawasan Nordik dibandingkan kawasan lainnya di Eropa. Dengan demikian peneliti akan mendapatkan pengetahuan dan pemahaman untuk mengetahui kepentingan Tiongkok melakukan pendekatan ke kawasan Nordik dan langkah-langkah Beijing untuk mencapai kepentingan politik di kawasan tersebut.

Literatur bacaan ini membahas dan menjelaskan prioritas dari kebijakan Tiongkok di kawasan Nordik. Pembahasan tersebut memiliki cakupan yang lebih luas seperti dari pihak-pihak terlibat, aktivitas di kawasan, dan kebijakan Beijing dalam melakukan pendekatan. Pembahasan tersebut akan membuat cakupan dari negara-negara yang terlibat menjadi lebih luas. Sedangkan penelitian yang diangkat membahas faktor-faktor yang mendorong Tiongkok menjalin kerja sama bilateral bersama salah satu negara di Kawasan Nordik, yakni Denmark. Penelitian ini terbatas membahas hubungan bilateral yang dibangun oleh kedua negara. Selain itu, peneliti juga lebih berfokus kepada kerja sama *China-Denmark Joint Work Programme* (2017-2020). Sehingga bahan bacaan ini memiliki fokus pembahasan dan level analisis penelitian yang berbeda.

Kedua, tinjauan pustaka oleh Julian Tucker and Johannes Nordi yang berjudul *China and the Nordics: Tracing Trends in Relations*. Hubungan diplomatik antara Tiongkok modern dan negara-negara Nordik cenderung bergerak mengikuti prioritas domestik dan regional Beijing. Hubungan mereka banyak dipengaruhi oleh peningkatan ekonomi, pertukaran sosial, dan interpersonal yang melekat pada dunia global, dengan implikasi yang signifikan bagi wacana tentang hak asasi manusia, rantai nilai internasional, pengembangan teknologi, dan keamanan. Perdagangan merupakan wadah terpenting bagi kedua pihak dengan

negara Nordik mengutamakan potensi pasar ekspor yang luas dan Beijing lebih berfokus kepada *Foreign Direct Investments* (FDI) di Eropa Utara.²⁰ Meskipun terdapat semangat akan keuntungan perdagangan, negara-negara Nordik tetap relatif berhati-hati terhadap pengaruh investasi infrastruktur Beijing seperti *Belt and Road Initiative* (BRI).

Bahan bacaan ini memberikan gambaran terkait hubungan modern Tiongkok dengan negara-negara Nordik. Peneliti jadi mengetahui bahwa hubungan kedua belah pihak banyak dipengaruhi oleh kerja sama ekonomi dan pertukaran sosial dan kebudayaan. Perdagangan dan investasi menjadi poros pertumbuhan dan perkembangan ekonomi dari kedua pihak. Meskipun demikian, melalui literatur ini peneliti juga memahami bahwa kerja sama yang menguntungkan ini tidak lantas membuat Tiongkok diterima sepenuhnya. Tiongkok menanggapi situasi tersebut dengan memanifestasikan dirinya dalam kekhawatiran tentang dampak keamanan nasional dari merger dan akuisisi, peningkatan retorika diplomatik, dan keinginan besar Beijing untuk menerapkan tekanan ekonomi atas isu-isu politik. Secara keseluruhan, kerja sama antara Tiongkok dan negara-negara Nordik ini dapat terus berjalan dikarenakan kedua pihak saling membutuhkan satu sama lain.

Perbedaan antara literatur ini dengan penelitian yang diangkat berada pada latar belakang yang mendasari kerja sama. Nordik menekankan kepada bagaimana pengaruh dan kekuatan Tiongkok mendorong negara-negara Nordik untuk menjalin kerja sama dengan Beijing. Walaupun terdapat sentimen akan keberadaan Tiongkok di kawasan, negara-negara tersebut digambarkan perlu untuk tetap menjalin kerja sama. Sedangkan penelitian yang diangkat menjelaskan bagaimana

²⁰ Julian Tucker and Johannes Nordin, *China and the Nordics: Tracing Trends in Relations*, (Stockholm: Institute for Security and Development Policy, 2021).

kerja sama antara Tiongkok dan Denmark dilatarbelakangi oleh pemahaman dan kepentingan bersama. Hubungan kedua negara mengalami tren positif dalam dekade terakhir. Hubungan baik tersebut kemudian dimanifestasikan melalui kerja sama *China-Denmark Joint Work Programme* (2017-2020). Sehingga kerja sama antara Tiongkok dan Denmark ini tidak didasari oleh keterpaksaan. Berbeda halnya dengan kerja sama yang dijalankan oleh Tiongkok bersama negara-negara Nordik.

Ketiga, bahan bacaan yang digunakan berjudul *The hardships of Chinese soft-power promotion in Denmark* oleh Andreas Bøje Forsby. Tulisan ini menjelaskan bagaimana sulitnya untuk mengubah dan/atau memperbaiki persepsi umum yang dimiliki masyarakat Denmark terhadap Tiongkok. Kedutaan dan lembaga-lembaga terkait berupaya memperkenalkan kebudayaan dan bahasa Tiongkok melalui Diplomasi Panda dan mengorganisir berbagai kegiatan tradisional seperti festival lentera, acara perahu naga, pertunjukan seni tari dan pemutaran film Tiongkok. Beberapa dari kegiatan ini diselenggarakan oleh Pusat Kebudayaan Tiongkok di Kopenhagen, yang diresmikan pada tahun 2014 dan yang pertama di Eropa Utara. Meskipun demikian, pertunjukkan kebudayaan Tiongkok di tingkat kotamadya sebagai bagian program Kota Persahabatan Denmark-Tiongkok dan melibatkan 30 kemitraan tidak terlalu berpengaruh signifikan.²¹

Tulisan ini memberikan gambaran kepada peneliti terkait persepsi masyarakat Denmark terhadap keberadaan Tiongkok. Adapun penyebab memburuknya persepsi masyarakat Denmark terhadap Tiongkok adalah sebagai berikut: 1) kuatnya rezim komunis RRT pada kepemimpinan Xi Jinping; 2) kebijakan konfrontatif Tiongkok yang diadopsi oleh pemerintahan Trump di

²¹ Andreas Bøje Forsby, "The Hardships of Chinese Soft-Power Promotion in Denmark," dalam *China's Soft Power in Europe: Falling on Hard Times*, Clingendael Institute, 2021.

Amerika Serikat; dan 3) pengungkapan pada media Denmark tentang pengaruh orang Tionghoa yang terselubung, yang dalam kasus paling menonjol menimbulkan pelanggaran konstitusional oleh otoritas kepolisian Denmark untuk kepentingan orang Tionghoa. Bacaan ini membantu peneliti untuk memahami bahwa meskipun kedua negara memiliki hubungan baik dan menjalin banyak kerja sama bilateral, masyarakat Denmark itu sendiri masih memiliki persepsi negatif terhadap Tiongkok. Hal ini kemudian membantu peneliti untuk memahami kepentingan Tiongkok melakukan pendekatan kepada Denmark.

Literatur bacaan ini menggambarkan bagaimana situasi dan pandangan negatif yang dimiliki masyarakat Denmark terhadap Tiongkok. Penulis juga menjelaskan penyebab dari buruknya pandangan masyarakat terhadap Tiongkok. Lebih lanjut, bacaan ini menjelaskan bagaimana upaya Beijing untuk memperbaiki situasi tersebut dengan menyelenggarakan berbagai kegiatan bernuansa kebudayaan Tiongkok. Sedangkan, penelitian yang diangkat berupaya menjelaskan pendekatan yang diambil Tiongkok terhadap Denmark melalui kerja sama *China-Denmark Joint Work Programme* (2017-2020). Peneliti tidak secara langsung menjelaskan penyebab buruknya persepsi masyarakat Denmark tapi menjelaskan bagaimana pemerintah kedua negara bekerja sama melalui kerja sama tersebut.

Keempat, bahan bacaan yang ditulis oleh Luke Patey berjudul *Rethinking Denmark's Relationship with Beijing (Denmark's China Challenge)*. Patey berupaya untuk mengkaji ulang hubungan yang dijalankan oleh Denmark bersama Tiongkok. Kementerian Keamanan dan Luar Negeri, serta Badan Intelijen Denmark telah meningkatkan perhatiannya terhadap pengaruh Tiongkok dalam beberapa tahun belakang. Pada situasi persaingan geopolitik tersebut, perdagangan dan

investasi menjadi peluang dalam hubungan bilateral keduanya terutama saat Denmark menandatangani Kemitraan Strategis Komprehensif dengan Beijing pada tahun 2008. Bisnis tampaknya menjadi ruang aman antara kedua negara untuk bertahan di masa depan. Pada tahun 2018, Beijing telah menjadi rekan dagang terbesar ketujuh negara dalam perdagangan barang dan pelayanan. Lebih signifikan, Tiongkok berubah menjadi destinasi investasi strategis bagi beberapa perusahaan besar Denmark.²²

Tulisan ini memberikan gambaran terkait sikap pemerintah Denmark atas Tiongkok. Mereka sepakat menganggap keberadaan Beijing sebagai ancaman di kawasannya baik secara politik maupun keamanan. Pemerintah Denmark bahkan telah menginstruksikan untuk memberikan perhatian lebih kepada aktivitas Beijing di wilayahnya. Pada saat itu, kedua pemerintah ternyata masih dapat menjalin kerja sama bilateral dimana sektor ekonomi menjadi perhatian utama. Berdasarkan hal tersebut, peneliti mendapatkan gambaran bahwa kerja sama komprehensif yang tengah dilakukan oleh Tiongkok dan Denmark dijalankan keduanya dengan tetap saling waspada satu sama lain. Dengan begitu, peneliti memahami bahwa kerja sama yang terjalin antara keduanya masih didasari oleh kepentingan bersama dan hanya bersifat kontemporer.

Perbedaan bacaan ini dengan penelitian yang diangkat adalah disini Patey membahas kemungkinan yang ada dari hubungan kedua negara. Dia menjelaskan bagaimana sikap terbuka Denmark dalam menjalin kerja sama dengan Tiongkok, namun di waktu yang bersamaan juga bersikap waspada dengan keberadaan Beijing di kawasannya. Sedangkan pada penelitian yang diangkat, peneliti membahas

²² Luke Patey, *Rethinking Denmark's Relationship with Beijing: Denmark's China Challenge*, Danish Institute for International Studies (DIIS), Oktober 2019).

kepentingan dari Tiongkok dalam menjalin kerja sama bersama Denmark melalui *China-Denmark Joint Work Programme (2017-2020)*. Dibandingkan dengan dinamika dalam negeri suatu negara, peneliti lebih menyinggung bagaimana Beijing dapat menjalin kerja sama bilateral dengan Denmark dalam dinamika politik Eropa. Seperti yang diketahui bahwa keberadaan Tiongkok dikawasan tersebut banyak mendapatkan kecaman dan penolakan dari negara-negara Eropa termasuk dari Denmark itu sendiri.

Kelima, literatur bacaan yang digunakan berjudul *Singapore-China Relations: Building Substantive Ties amidst Challenges* oleh Lye Liang. Tulisan ini menjelaskan perjalanan panjang hubungan diplomatik antara Singapura dan Tiongkok. Sebelumnya Singapura pernah menolak untuk menjalin hubungan diplomatik resmi dengan Tiongkok. Kedua negara baru menjalin hubungan diplomatik ketika pemerintah Singapura sudah berhasil menyelesaikan permasalahan dalam negerinya sekaligus menjadikannya negara ASEAN terakhir yang menjalin hubungan diplomatik dengan Beijing. Lebih lanjut, hubungan kedua negara berkembang menjadi lebih dekat dan bersahabat meskipun menerapkan ideologi dan sistem pemerintahan berbeda. Dalam praktiknya, Singapura mengadopsi pendekatan pragmatis dan memelihara hubungan ekonomi dan perdagangan dengan Tiongkok.²³

Bahan bacaan ini berkontribusi untuk memberikan gambaran kepada peneliti terkait kerja sama bilateral yang dilakukan Tiongkok bersama negara lain terutama negara kecil. Meskipun kedua negara memiliki banyak perbedaan tapi tidak menghalangi mereka untuk mengembangkan hubungan persahabatan dan

²³ Lye Liang Fook, "Singapore-China Relations: Building Substantive Ties amidst Challenges," *Southeast Asian Affairs*, no. 1 (2018): 321–342.

substantif pada berbagai bidang dan tingkatan. Terlepas dari wilayahnya yang kecil, Singapura memiliki pencapaian sosio-ekonomi serta pemerintahan yang efektif. Hal ini menjadi nilai tersendiri bagi Tiongkok untuk menjalin kerja sama bilateral dengan Singapura. Situasi serupa juga dialami Denmark karena negara tersebut memiliki wilayah yang kecil dan menerapkan sistem pemerintahan berbeda. Kedua negara dinilai memiliki potensi dan kelebihan tersendiri yang menjadi daya tarik Tiongkok untuk menjalin kerja sama.

Perbedaan dari bahan bacaan ini dengan penelitian yang diangkat berada pada subjek penelitiannya. Literatur ini membahas sejarah hubungan diplomatik dan kerja sama yang dilakukan Singapura dan Tiongkok. Kedua negara terus mengidentifikasi bidang-bidang baru untuk berkolaborasi, seperti di bidang keuangan, permasalahan peradilan dan hukum, permasalahan *e-commerce* dan infrastruktur. Sedangkan, peneliti membahas hubungan bilateral antara Tiongkok dan Denmark. Selain itu, peneliti juga berfokus kepada pembahasan kepentingan Tiongkok dalam menjalin kerja sama dengan Denmark melalui *China-Denmark Joint Work Programme (2017-2020)*. Perbedaan selanjutnya terdapat pada batasan pembahasan dimana bacaan ini membahas perjalanan hubungan diplomatik antara Singapura dan Tiongkok hingga masa sekarang. Dalam hal ini peneliti membatasinya hanya sebatas jangka waktu pelaksanaan kerja sama *China-Denmark Joint Work Programme (2017-2020)*.

1.7 Kerangka Konseptual

1.7.1 Kebijakan Luar Negeri

Keputusan, strategi, dan tujuan suatu negara berinteraksi dengan negara lain dapat diidentifikasi melalui kebijakan luar negeri negara. Hal ini dikarenakan kebijakan luar negeri kemungkinan besar dirumuskan sesuai dengan kepentingan nasional.²⁴ Terdapat definisi dan pandangan yang berbeda-beda terkait kebijakan luar negeri. Menurut Jesmine Ahmend kebijakan luar negeri adalah produk dari interaksi antara pembuat keputusan suatu negara dan lingkungan di mana mereka ditempatkan atau berada. Pernyataan ini berarti bahwa kebijakan luar negeri suatu negara karena kebijakan luar negeri merupakan cerminan dari kebijakan dalam negeri wilayah tersebut.²⁵ Selanjutnya, Halvard Leira berpendapat bahwa kebijakan luar negeri muncul ketika urusan luar negeri suatu negara dipertanyakan di dalam negeri. Pernyataan ini berkaitan dengan proses munculnya ruang publik dan pers yang relatif bebas sejak abad kedelapan belas.²⁶

Peneliti menggunakan konsep kebijakan luar negeri yang disampaikan oleh Bojang sebagai kerangka konseptual untuk menganalisis faktor-faktor yang mendorong Tiongkok menjalin kerja sama dengan Denmark melalui *China-Denmark Joint Work Programme* (2017-2020). Bojang berpendapat bahwa kebijakan luar negeri dapat dibagi menjadi tiga bagian.²⁷ Pertama, tujuan (end), merupakan serangkaian kepentingan atau tujuan yang diinginkan dalam

²⁴ Robert H. Jackson dan Georg Sørensen, *Introduction to International Relations: Theory and Approaches*, 5th ed. (Oxford: Oxford University Press, 2003) halaman 68

²⁵ Jesmine Ahmed, "The Theoretical Significance of Foreign Policy in International Relations- An Analyses," *Journal of Critical Reviews* 7, no. 2 (2020): 788.

²⁶ Halvard Leira, "The Emergence of Foreign Policy," *International Studies Quarterly* 63, no. 1 (2019): 188.

²⁷ Bojang AS, "The Study of Foreign Policy in International Relations," *Journal of Political Sciences & Public Affairs* 06, no. 04 (2018): 2.

berinteraksi dengan negara lain. Kedua, cara (ways), terdiri dari strategi negara untuk mengejar kepentingan nasional seperti taktik diplomasi. Ketiga, sarana (means), terdiri dari sumber daya terdapat di suatu negara seperti kekuatan ekonomi atau militer untuk menjalankan kebijakan luar negeri tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kebijakan luar negeri adalah serangkaian kepentingan yang diinginkan oleh negara ketika berinteraksi bersama negara/aktor lain melalui strategi dan gagasan dalam mewujudkan tujuan nasional dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh negara itu sendiri.

Kebijakan luar negeri merupakan titik pertemuan antara perpolitikan domestik dan internasional. Para sarjana berpendapat bahwa kebijakan luar negeri berfungsi sebagai titik persimpangan politik domestik dan internasional. Pernyataan ini bermakna bahwa kebijakan luar negeri dilaksanakan setelah mempertimbangkan dan memperhatikan peristiwa dan situasi yang terjadi dalam domestik negara maupun dunia internasional. Menurut Bojang proses pembentukan kebijakan luar negeri dipengaruhi dan ditentukan oleh dua faktor, yakni faktor eksternal dan faktor internal.²⁸ Dia juga mengatakan bahwa tingkat pengaruh antara faktor internal dan eksternal terhadap kebijakan luar negeri dapat bervariasi tergantung dari lingkungan negara dan kondisi geopolitik negara tersebut. Dalam beberapa kasus, faktor internasional dapat memainkan peran utama dalam perumusan kebijakan luar negeri. Namun, pada kasus lainnya, faktor domestik dapat berperan lebih penting pada perumusan kebijakan luar negeri.

²⁸ Bojang AS, "The Study of Foreign Policy in International Relations", *Journal of Political Sciences & Public Affairs*, 2.

A. Faktor Eksternal Kebijakan Luar Negeri

Kebijakan luar negeri sangat dipengaruhi oleh kondisi dari dunia internasional. Kebijakan ini tentu berkaitan dengan pelaksanaan politik internasional yang secara umum membahas interaksi suatu negara dengan negara lain yang hanya terdapat pada tingkat internasional. Faktor eksternal terdiri dari lima faktor, yaitu sebagai berikut:

1. Sistem Internasional atau Struktur Kekuatan

Sistem internasional memiliki peran penting dalam proses perumusan kebijakan luar negeri suatu negara. Bojang menekankan bahwa kerangka umum politik dunia memainkan peran yang menentukan dalam menentukan kebijakan luar negeri suatu negara. Peristiwa seperti Revolusi Bolshevik tahun 1917, kebangkitan Komunis Tiongkok pada tahun 1949, dan berdirinya berbagai negara baru di Asia dan Afrika memiliki dampak besar terhadap struktur internasional. Sebagai contoh Italia telah menggunakan strategi ini ketika berpindah sisi selama puncak Perang Dunia Pertama untuk mendapatkan keuntungan pasca terjadinya perang. Selain itu, selama periode tahun 1980-an, sistem internasional berada dalam sistem bipolar ketika berlangsungnya Perang Dingin antara AS dan Uni Soviet. Peristiwa ini telah merestrukturisasi sistem kekuasaan yang berdampak signifikan terhadap pelaksanaan kebijakan luar negeri itu sendiri. Dengan begitu kebijakan luar negeri negara dapat berubah sesuai dengan struktur kekuatan atau sistem internasional.

2. Hukum Internasional

Hukum internasional adalah seperangkat aturan yang mengatur hubungan antar negara. Menurut Bojang, hukum internasional dan norma-norma yang berlaku

di dunia internasional dapat membatasi perilaku suatu negara dalam bertindak atau dengan kata lain mempengaruhi kebijakan luar negeri. Hukum internasional didefinisikan sebagai objektif yang mengarahkan aktivitas dan hubungan antara satu negara dengan negara lain. Hal ini dikarenakan hukum internasional mengatur kebijakan luar negeri negara dan memiliki fungsi mengikat dalam kebijakan luar negeri karena hukum tersebut menawarkan kerangka hukum bagaimana suatu negara harus bertindak. Singkatnya, hukum internasional mendefinisikan status, hak, tanggung jawab, dan kewajiban negara-negara dalam kebijakan luar negeri.

3. Organisasi Internasional

Organisasi Internasional (OI) memiliki peran penting dalam sistem internasional yang ada. Menurut Bojang, Organisasi internasional dilihat sebagai aktor aktif dalam kajian hubungan internasional karena berperan untuk memfasilitasi kegiatan antara negara-negara di tingkat dunia. Suatu negara akan mempertimbangkan kehadiran dari organisasi-organisasi, blok-blok perdagangan, dan perjanjian internasional dalam merumuskan kebijakan luar negeri. Sejak Perang Dunia berakhir, sejumlah organisasi internasional telah banyak berdiri seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), *International Monetary Fund* (IMF), dan *World Bank* (WB). Ketika suatu negara menjadi anggota dalam organisasi baik di tingkat internasional, regional, maupun sub-regional, hal ini berarti negara tersebut telah menyerahkan sebagian kedaulatannya kepada organisasi yang diikuti. Hal ini dikarenakan kebijakan atau langkah mereka akan dipandu oleh konstitusi organisasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kebijakan dan sikap negara dapat dipengaruhi oleh lembaga internasional.

4. Aliansi

Perumusan aliansi dianggap sebagai landasan kebijakan keamanan. Pembentukan aliansi dianggap sebagai salah satu strategi yang dipilih negara untuk mengimplementasikan kebijakan luar negeri. Hal ini dikarenakan negara yang menjadi anggota aliansi harus menyetujui permintaan dan tuntunan dari anggota aliansi lainnya dan mampu menahan diri untuk membuat kebijakan yang bersifat ofensif terhadap rekan aliansi. Dinesh, seorang sarjana hubungan internasional menegaskan bahwa aliansi berfungsi sebagai instrumen kebijakan luar negeri. Penerapan ini dapat dilihat selama periode 1945 hingga 1990, ketika Amerika Serikat dan Uni Soviet mengakui dan menggunakan aliansi sebagai sarana untuk mengkonsolidasikan posisi mereka dalam tatanan internasional.

5. Strategi Militer/Perlombaan Senjata

Perlombaan senjata adalah pembelanjaan pertahanan yang kompetitif dan pembangunan kemampuan militer antara dua negara atau blok negara. Perlombaan senjata memperlihatkan kuantitas dan kualitas dari kekuatan militer yang dimiliki oleh negara. Negara dengan kekuatan militer yang cukup memiliki inisiatif dan daya tawar yang lebih besar di dunia internasional khususnya pada politik internasional. Perlombaan senjata modern pertama terjadi ketika Prancis dan Rusia menantang keunggulan angkatan laut Inggris pada akhir abad ke-19. Contoh lainnya adalah permusuhan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet menjelang akhir Perang Dunia Pertama. Perbedaan ideologis yang mendalam antara kedua negara pada akhirnya berdampak pada sistem internasional. Beberapa kasus perlombaan senjata yang masih berlangsung hingga saat sekarang adalah hubungan antara India-Pakistan, Tiongkok-India, dan Korea Utara-Selatan.

B. Faktor Internal Kebijakan Luar Negeri

Seperti faktor determinan eksternal, para sarjana sepakat bahwa kondisi domestik suatu negara juga mempengaruhi sifat dan arah kebijakan luar negerinya. Kehadiran dari aktor-aktor di suatu negara dan dinamika perkembangan yang terjadi dapat mempengaruhi proses pembentukan kebijakan luar negeri. Faktor internal sendiri terdiri dari sembilan faktor, yaitu sebagai berikut.

1. Kebudayaan dan Sejarah

Banyak sarjana hubungan internasional yang berpendapat dengan jelas bahwa cara berpikir masyarakat dan budaya berpengaruh pada kebijakan yang dibuat. Frode berpendapat bahwa diplomasi budaya memiliki akar yang dalam dan dapat dengan mudah ditemukan dalam arsip menteri luar negeri. Suatu bangsa mewarisi gaya dan budaya yang kemudian mempengaruhi dan menentukan tindakan bangsa tersebut dalam berinteraksi dengan negara berdaulat lainnya. Pendekatan suatu bangsa terkait permasalahan luar negeri ditentukan oleh nilai-nilai dan kepercayaan tradisionalnya yang telah muncul dalam kurun waktu yang lama. Selain itu, kolonisasi juga merupakan pengalaman sejarah yang mempengaruhi kebijakan luar negeri suatu negara. Sehingga pengalaman sejarah seperti budaya dan tradisi suatu negara, memiliki pengaruh terhadap kebijakan luar negeri negara.

2. Geografi, Ukuran, dan Populasi

Luas wilayah, kondisi geografi, dan jumlah penduduk juga memiliki pengaruh terhadap pelaksanaan politik luar negeri suatu negara. Letak geopolitik suatu negara juga merupakan salah satu faktor yang tidak terbantahkan dalam menentukan kebijakan luar negeri suatu negara. Semua hal tersebut dapat dijadikan

sebagai alat yang mengarahkan dan menentukan kebijakan luar negeri negara. Negara-negara yang memiliki wilayah dan populasi kecil seperti Brunei tidak akan mengharapkan negara mereka untuk ikut aktif dalam penerbangan internasional. Sedangkan negara-negara dengan jumlah populasi banyak dan wilayah luas seperti Amerika Serikat, Tiongkok, dan Rusia cenderung akan bersedia untuk lebih terlibat dalam penerbangan internasional. Dari kondisi tersebut dapat dilihat bahwa kondisi geografis dan sebagainya memang mempengaruhi kebijakan luar negeri.

3. Pembangunan Ekonomi dan Ketersediaan Sumber Daya Alam

Perekonomian memiliki peranan yang krusial dalam membuat kebijakan luar negeri. Banyak negara industrial yang memainkan peranan dominan dalam perpolitikan internasional. Negara besar seperti Amerika Serikat, Rusia, dan Jerman memiliki perekonomian yang cukup untuk menyebarkan pengaruhnya melalui bantuan dan pinjaman sehingga kepentingan nasionalnya dapat terjaga. Di waktu yang bersamaan, sumber daya alam yang dimiliki negara akan memperkuat tingkat perkembangan perekonomian negara tersebut. Sumber daya alam ini meliputi mineral, gas, petroleum, minyak mentah, dan sumber daya air. Menurut Rizwan kepemilikan sumber daya minyak membuat Timur Tengah memiliki pengaruh dan posisi kuat dalam perpolitikan dunia. Berkat diplomasi minyaknya, negara-negara kecil seperti Qatar, menjalankan kebijakan luar negeri dengan lebih percaya diri.

4. Kapabilitas Militer

Kekuatan militer dapat mempengaruhi keputusan terkait strategi politik luar negeri. Kemampuan untuk mempertahankan perbatasan dari pihak asing berperan penting dalam kebijakan luar negeri yang dibuat negara. Negara yang mampu secara militer akan dapat merumuskan kebijakan luar negeri mereka dengan

mandiri dibandingkan dengan negara yang tidak. Selain itu, kemampuan militer dapat merubah kebijakan suatu negara yang pada awalnya cenderung bersikap defensif menjadi bersikap agresif. Negara-negara dengan kemampuan militer besar seperti AS, Tiongkok, dan Rusia, cenderung aktif dan giat dalam mengejar tujuan kebijakan luar negerinya dalam sistem internasional. Di sisi lain, negara dengan kemampuan militer yang lemah cenderung mengejar tujuan nasional mereka dengan menjalin hubungan dengan negara yang lebih kuat.

5. Sistem Politik

Organisasi dan lembaga politik yang terdapat di suatu negara memiliki peran tersendiri dalam mempengaruhi kebijakan luar negeri negara tersebut. Negara dengan bentuk pemerintahan yang otoriter cenderung lebih mudah dan cepat dalam mengambil keputusan luar negeri karena keputusan berada pada individu. Selain itu, negara ini juga cenderung tertutup dalam perpolitikan internasional seperti Korea Utara dan Myanmar. Sedangkan sistem demokrasi, implementasi politik luar negerinya cenderung sulit dan lambat dikarenakan keputusan luar negeri diputuskan oleh banyak pihak. Di negara yang menggunakan sistem ini, warga negara dapat bebas mengekspresikan pendapatnya terkait kebijakan dalam negeri maupun luar negeri. Para pemimpin dalam sistem ini juga cenderung menanggapi tuntutan publik dalam merumuskan kebijakan luar negeri negara.

6. Kepribadian dan Karakter Pemimpin

Kepemimpinan dan kepribadian seorang pemimpin memiliki tempat tersendiri terhadap kebijakan luar negeri. Peran kepemimpinan dan kepribadian terhadap proses tersebut mencakup proses kognitif dengan mengasumsikan bahwa pada akhirnya seorang individu lah yang membuat keputusan dan bukan negara.

Menurut Bojang, pemimpin dapat dikategorikan menjadi dua. Pertama, *hawks*, yaitu seorang pemimpin menjalankan kebijakan luar negeri agresif yang berorientasikan pada militer. Kedua, *doves*, yaitu pemimpin yang menyukai perdamaian dan menyelesaikan konflik internasional tanpa menggunakan kekerasan. Menurut Herman, seorang pemimpin agresif cenderung memiliki tingkat nasionalisme yang tinggi. Sedangkan pemimpin perdamaian cenderung memiliki tingkat nasionalisme yang rendah.

7. Partai Politik dan Kelompok Kepentingan

Partai politik sangat penting untuk mengatur jalannya perpolitikan negara terutama pada negara demokrasi. Di bawah sistem multipartai dan pemerintahan koalisi, partai politik menyuarakan kepentingannya secara langsung atau melalui kelompok kepentingan dalam membentuk kebijakan luar negeri. Sedangkan partai oposisi dalam pemerintahan biasanya memiliki pandangan dan kepentingan yang saling bertentangan yang dapat mengubah perumusan kebijakan luar negeri. Menurut Keohane, kelompok kepentingan secara terorganisir dapat menentukan kebijakan luar negeri. Dalam pandangan, para pejabat pemerintah melakukan tawar-menawar dengan kelompok kepentingan untuk mencari keuntungan secara bersama-sama melalui keputusan kebijakan negara. Terjadinya peningkatan dalam interkoneksi dan pesatnya pertumbuhan globalisasi, kelompok penekan memiliki kepentingan lebih dalam kebijakan luar negeri negara.

8. Pers dan Opini Publik

Thrice menyatakan bahwa sumber domestik yang menentukan kebijakan luar negeri yang diakui secara luas adalah kelompok kepentingan, opini publik, media cetak, dan elektronik. Tomz, membedakan dua cara yang dapat dilakukan

publik dalam membentuk kebijakan. Pertama, publik dapat memberikan pengaruh dengan memilih partai atau kandidat yang posisi kebijakan luar negerinya paling sesuai dengan posisi mereka. Kedua, setelah politisi menjabat, para pemimpin dapat menanggapi opini publik karena khawatir penolakan publik dapat merugikan secara politik. Selain itu, perkembangan media sosial juga mempermudah proses penyampaian opini publik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa opini publik mempengaruhi kebijakan luar negeri dalam sistem demokrasi.

9. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Perkembangan teknologi mengalami perkembangan yang pesat seperti di bidang penerbangan internasional, komunikasi, kerja sama, dan bahkan konflik antar negara dalam mengejar keamanan, pembangunan, dan kemajuan. Dalam beberapa tahun terakhir, pertimbangan ilmu pengetahuan dan teknologi sering kali menjadi pusat interaksi negara dengan pemerintah lain melalui diskusi tentang topik kritis seperti non-proliferasi nuklir, penggunaan luar angkasa, populasi, perubahan iklim, sumber daya energi, dan daya saing teknologi industri. Dengan demikian, dampak ilmu pengetahuan dan teknologi pada masyarakat manusia dan keamanan nasional telah membuat negara dan profesional kebijakan luar negeri menggunakannya sebagai alat untuk berhasil menegosiasikan urusan internasional.

Penelitian ini menggunakan lima faktor internal dan tiga faktor eksternal yang dinilai dapat menjawab pertanyaan penelitian. Lima faktor internal yang digunakan, yaitu faktor sejarah dan kebudayaan, faktor pembangunan politik dan sumber daya alam, faktor sistem politik, faktor partai politik dan kelompok kepentingan, dan faktor ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, tiga faktor eksternal yang peneliti gunakan, yaitu faktor sistem internasional atau struktur

kekuatan, faktor hukum internasional, dan faktor organisasi internasional. Faktor-faktor tersebut yang kemudian mendorong Tiongkok menjalin kerja sama Dengan Denmark melalui *China-Denmark Joint Work Progamme* (2017-2020).

Pada penelitian ini, terdapat empat faktor internal dan dua faktor eksternal yang tidak digunakan. Berikut empat faktor internal tersebut beserta alasannya. *Pertama*, faktor geografi, ukuran, dan populasi. Tiongkok dan Denmark berada pada situasi geografi dan geopolitik yang berbeda. *Kedua*, faktor kapabilitas militer. Hubungan Tiongkok dan Denmark tidak didorong oleh kepentingan militer. *Ketiga*, faktor kepribadian dan karakter pemimpin. Penelitian ini berfokus kepada pemerintah Tiongkok dan bukan pemimpin yang berkuasa. *Keempat*, faktor pers dan opini publik. Tiongkok merupakan negara Komunis yang membatasi kebebasan dalam berpendapat. Selanjutnya, berikut dua faktor eksternal tersebut beserta alasannya. *Pertama*, faktor aliansi. Tiongkok dan Denmark tidak terlibat dalam suatu aliansi pertahanan. *Kedua*, faktor strategi militer atau perlombaan senjata. hubungan kedua negara tidak dibangun atas kepentingan keamanan.

1.8 Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian dalam kajian hubungan internasional merupakan suatu proses, prinsip, dan prosedur yang digunakan oleh peneliti sebagai bentuk upaya untuk memperoleh pengetahuan tentang suatu fenomena tertentu dalam hubungan internasional.²⁹ Metode penelitian yang digunakan akan membantu peneliti dalam mendapatkan jawaban dari pertanyaan penelitian yang diangkat secara sistematis, terencana, dan bersifat ilmiah.

²⁹ Mohtar Mas'ud, "Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin Dan Metodologi" (Jakarta: Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, 1990), 2-3.

1.8.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian adalah metode kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, dan pemikiran individual maupun kelompok.³⁰ Sedangkan jenis penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian adalah deskriptif analisis. Jenis penelitian ini membantu peneliti dalam menjelaskan dan menganalisis permasalahan yang diangkat secara deskriptif. Pendekatan penelitian dan jenis penelitian ini digunakan untuk menjelaskan data-data dari majalah berita, laporan resmi, jurnal dan artikel penelitian ilmiah.³¹

1.8.2 Batasan Penelitian

Peneliti menggunakan batasan penelitian dari tahun 2008 hingga 2020. Hal ini dikarenakan Tiongkok dan Denmark menyepakati Kemitraan Strategis Komprehensif pada tahun 2008. Kemitraan ini membawa hubungan kedua negara ke tingkatan yang baru dan juga menjadi cikal bakal dari terciptanya kerja sama *China-Denmark Joint Work Programme (2017-2020)*.

1.8.3 Unit dan Tingkat Analisis

Unit Analisa, yaitu yang perilakunya hendak kita deskripsikan, jelaskan, dan ramalkan (disebut juga “variabel dependen”). Sedangkan unit eksplanasi, yaitu yang dampaknya terhadap unit Analisa hendak kita amati (disebut juga “variabel

³⁰ Muhammad Rizal, dani nur Saputra, and lis hafrida, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ed. M.Pd Dr. Fatma Sukmawati, Pradina Pustaka (Pradina Pustaka, 2022). 7-8.

³¹ John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 4th ed. (California: SAGE Publications, 2014), 220, <https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results>.

independen”).³² Pada penelitian ini, unit analisisnya adalah faktor-faktor yang mendorong Tiongkok menjalin kerja sama dengan Denmark melalui *China-Denmark Joint Work Programme* (2017-2020). Selanjutnya, unit eksplanasi dalam penelitian ini adalah kerja sama Tiongkok dengan Denmark melalui *China-Denmark Joint Work Programme* (2017-2020). Sedangkan tingkat analisis adalah sebuah teori yang membantu peneliti untuk menemukan jawaban pertanyaan penelitian. Menurut Carmen Gebhard, terdapat empat level analisis, yaitu level sistem, level negara, level kelompok, dan level individual.³³ Tingkat analisis yang terdapat pada penelitian ini berada di level negara yaitu Tiongkok karena peneliti berfokus menganalisis faktor-faktor yang mendorong Tiongkok menjalankan kerja sama *China-Denmark Joint Work Programme* (2017-2020).

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi pustaka. Studi pustaka adalah metode yang mengharuskan peneliti mencari seluruh data terkait melalui bahan bacaan seperti buku, dokumen, arsip atau literatur ilmiah berhubungan yang tersedia dalam perpustakaan.³⁴ Sumber utama yang digunakan adalah dokumen resmi kerja sama Tiongkok dan Denmark, yaitu *China-Denmark Joint Work Programme* (2017-2020). Dalam menjelaskan kerangka konseptual, peneliti menggunakan konsep kebijakan luar negeri oleh Bojang AS. Peneliti juga menggunakan web resmi dari lembaga pelayanan luar negeri Tiongkok dan Denmark seperti www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/ dan kina.um.dk/en untuk

³² Mohtar Mas'ood, "Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin Dan Metodologi." (Jakarta: Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, 1990), 39.

³³ Carmen Gebhard, "Levels of Analysis in International Relations," *E-International Relations*, 27 Maret 2022, diakses 24 Desember 2022, <https://www.e-ir.info/2022/03/27/levels-of-analysis-in-international-relations/>.

³⁴ M. Nasir, *Metode penelitian* (Jakarta: Galia Indonesia, 2003), 27

mengklasifikasi pernyataan informatif dari pejabat kedua negara. Selanjutnya, untuk mendukung argumentasi penelitian, peneliti menggunakan data-data dari sumber sekunder seperti buku berjudul *China and Denmark Relations since 1674* oleh Kjeld Erik Brodsgaard dan Mads Kirkebaek. Peneliti juga menggunakan sumber dari berita daring seperti CGTN, BBC, CNN, dan *New York Times* dan majalah ilmiah seperti *The Diplomat* sebagai referensi penelitian.

1.8.5 Teknik Analisis Data

Teknis analisis data merupakan proses yang penting dalam melakukan suatu penelitian. Penelitian baru disebut ilmiah ketika terdapat kesesuaian antara metode penelitian, instrumen, dan pengambilan sampel (termasuk ukuran dan prosedur) untuk memastikan integritas data ilmiah dan seluruh proses penelitian.³⁵ Dalam melakukan analisis data, peneliti bersandarkan kepada Miles dan Huberman. Menurut mereka terdapat tiga tahapan dalam analisis data.³⁶

1. Reduksi data

Pada tahapan ini peneliti mengelompokkan data-data yang telah dikumpulkan menjadi beberapa kategori. Pengelompokan dilakukan kepada data perdagangan, informasi teknologi, kepentingan politik, dan segala aktifitas kebudayaan masyarakat Tiongkok di Denmark. Data-data yang direduksi diprioritaskan berada dalam batasan waktu penelitian yakni dari 2017 hingga 2020.

³⁵ Demola Akinyoade, *Approaches to Data Analysis in Social Research*, 2013. 3

³⁶ Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis*, (California: Sage Publications, 1994), 18.

2. Penyajian data

Peneliti mengumpulkan data-data yang dianggap penting dan kemudian disajikan kembali dengan kalimat peneliti sendiri tanpa mengubah arti dan maksud aslinya. Selain itu, kalimat tersebut juga didukung oleh pernyataan dan/atau pemahaman dari bahan bacaan lainnya. Dalam hal ini, peneliti akan menganalisis kepentingan nasional pemerintah Tiongkok di negara Denmark.

3. Kesimpulan dan verifikasi

Kesimpulan dan verifikasi merupakan validasi dari konsep yang digunakan peneliti dalam menjawab pertanyaan penelitian. Kesimpulan dan verifikasi ini didasarkan kepada hasil penyajian data dan analisis penerapan konsep yang dilakukan pada penelitian.

1.9 Sistematika Penelitian

Bab I PENDAHULUAN

Peneliti menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka konseptual, metodologi penelitian (terdiri dari jenis penelitian, batasan masalah, tingkat dan unit analisis, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data), dan sistematika penelitian

Bab II KEBIJAKAN LUAR NEGERI PEMERINTAH TIONGKOK

Peneliti menjelaskan kebijakan luar negeri yang dijalankan oleh pemerintah Tiongkok. Penjelasan mencakup kebijakan luar negeri yang dijalankan oleh pemerintah Tiongkok secara umum, kebijakan luar negeri Tiongkok di Eropa dan kebijakan luar negeri Tiongkok di Denmark. Selain itu, peneliti juga menjelaskan beberapa kebijakan luar negeri yang diambil oleh pemerintah Tiongkok.

Bab III KERJA SAMA BILATERAL *CHINA-DENMARK JOINT WORK PROGRAMME (2017-2020)*

Peneliti menjelaskan secara rinci kerja sama *China-Denmark Joint Work Programme (2017-2020)*. Penjelasan meliputi prapembentukan (termasuk Kemitraan Kerja Sama Komprehensif 2008) hingga terbentuknya kerja sama ini. Selanjutnya peneliti juga menjelaskan program-program yang dijalankan oleh kedua negara melalui kerja sama ini. Program tersebut meliputi pembagian keenam fokus pembangunan, pihak-pihak yang terlibat, inisiatif atau aksi yang diambil, serta pedoman atau landasan yang digunakan dalam menjalankan kerja sama.

Bab IV ANALISIS FAKTOR-FAKTOR INTERNAL YANG MENDORONG TIONGKOK MENJALIN KERJA SAMA DENGAN DENMARK MELALUI *CHINA-DENMARK JOINT WORK PROGRAMME (2017-2020)*

Peneliti menganalisis faktor-faktor yang mendorong Tiongkok menjalin kerja sama dengan Denmark melalui *China-Denmark Joint Work Programme (2017-2020)*. Penjelasan terbagi menjadi dua, yakni dari faktor internal dan faktor eksternal. Terdapat lima faktor internal yang mendorong Tiongkok melakukan kerja sama ini, yakni faktor sejarah dan kebudayaan, faktor pembangunan ekonomi dan sumber daya alam, faktor sistem politik, faktor partai politik dan kelompok kepentingan, dan faktor ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, terdapat tiga faktor eksternal yang digunakan, yakni faktor sistem internasional atau struktur kekuatan, faktor hukum internasional, dan faktor organisasi internasional.

Bab V PENUTUP

Bagian ini berisi kesimpulan dan saran terhadap penelitian.